

Manajemen Keuangan Sekolah

Abdul Rokhman
Kementerian Agama
Kabupaten Bantul

email:
abdulrokhman18@yahoo.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah dan letak sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Dalam mengelola sekolah tujuan utamanya adalah bagaimana madrasah dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab pembiayaan pendidikan dalam manajemen keuangan sekolah harus dapat mengakomodir tuntutan eksternal dan internal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Hal yang penting adalah menempatkan fungsi manajemen keuangan benar-benar menunjukkan sasaran pembelajaran yang berimplikasi pada mutu pendidikan yang kompetitif.

Kata Kunci: *Manajemen Keuangan Sekolah, Mutu Pendidikan*

Pendahuluan

Manajemen merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan dan memberdayakan semua sumber daya, baik manusia maupun sumber daya lainnya. Manajemen adalah seni. Seni dalam mengorganisasi sesuatu untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu.

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Di sinilah peran seorang manajer sekolah atau Kepala Sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan sekolah, terdapat masalah antara lain :

1. Penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri (korupsi)
2. Membebankan pembiayaan kepada peserta didik
3. Pelaporan keuangan yang penuh manipulasi
4. Pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, perlu pengelolaan sumber daya terpadu antara sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk mengatur keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga ada kegiatan yang semestinya mendapat prioritas pendanaan dapat memperoleh anggaran.

Selanjutnya Bendaharawan sekolah dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan beberapa hal, seperti hemat dan sesuai dengan kebutuhan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, pesta.

Sumber dana sekolah selanjutnya di alokasikan sesuai dengan program dan kegiatan sekolah. Untuk memudahkan dalam manajemen keuangan sekolah, sehingga perlu disusun RKS dan RKAS.

Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991)

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu

- a. adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah
- b. adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,
- c. adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena

sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness "characterized by qualitative outcomes"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency "characterized by quantitative outputs"* (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya

Konsep Dasar Keuangan

Dalam suatu lembaga pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penunjang yang penting, yang sifatnya melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan. Dalam kondisi yang sangat terpaksa, pendidikan masih akan dapat berlangsung tanpa adanya biaya. Akan tetapi, setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan selalu mempunyai akibat keuangan.

Penanggung jawab administrasi biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya pendidikan di sekolah. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan kerja berfungsi sebagai otorisator untuk memerintahkan pembayaran. Bendaharawan sekolah ditugasi untuk melakukan fungsi kordinator dalam menguji hak atas pembayaran. Kepala sekolah wajib melakukan pengawasan dalam penggunaan pengawasan dalam penggunaan dana. Oleh sebab itu, kepala sekolah tidak boleh melaksanakan fungsi bendaharawan.

Masalah pemenuhan kebutuhan dana pendidikan itu dipandang sebagai hal yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini telah diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya. Namun, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua (USPN No.20 tahun 2003).

Undang-undang RI No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijadikan sebagai dasar hukum bagi daerah untuk mengatur diri sendiri (otonomi) yang berimplikasi pula pada pengelolaan pendidikan, dan keuangan pendidikan yang tidak selalu tergantung pada pusat dan organisasi pendidikan di daerah.

Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan itu mencakup dua aspek, yaitu:

1. Dimensi Penerimaan atau sumber dana, dan
2. Dimensi Pengeluaran atau alokasi dana.

Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi: pengeluaran modal/Kapital atau anggaran pembangunan (*capital outlay/expenditure*).

Keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan akan menimbulkan berbagai manfaat, diantaranya :

1. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal diperoleh hasil/tujuan tertentu.
2. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta termasuk kursus-kursus).
3. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran-kebocoran ataupun penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa dalam manajemen sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan

dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi kritis seperti sekarang ini.

Dan dalam prosesnya pengelolaan keuangan dalam bidang pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Penerimaan dan realisasi/penggunaan keuangan sekolah merupakan hal yang penting untuk mengetahui potensi dan apa yang akan dihasilkan dari potensi tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam konsep administrasi pendidikan menggunakan strategi, yaitu memfungsikan fungsi administrasi dalam pengelolaan keuangan sekolah seperti perencanaan, pengorganisasian sumber dana sekolah dan pendistribusiannya, penggerakan dan penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran serta mempertanggungjawabkannya.

Peran anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah serta manajemen sekolah secara keseluruhan sangat lah penting untuk mencapai tujuan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi sekolah. Anggaran meliputi aspek keuangan maupun aspek non keuangan dari operasi yang direncanakan. Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran yaitu menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, keberadaannya harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholder*, selain memikirkan bagaimana suatu keuntungan bias diperoleh sekolah.

Sumber-sumber Keuangan Sekolah

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

1. pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
2. Orang tua atau peserta didik;
3. Masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Bab XIII Bagian Kesatu Pasal 46 ayat (1) ditegaskan secara jelas, bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik.

Penggunaan Keuangan Sekolah

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dibukukan dan diagendakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, perpustakaan, serta di tempat lainnya digunakan secara efektif dan efisien, dan sasaran penggunaan dana tersebut sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah.

Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu No. 585/k/1987 dan 590/kmk 03/03/1987 tanggal 24 September 1987 kegiatan-kegiatan tersebut adalah antara lain:

1. Pemeliharaan saran/prasarana
2. PBM/KBM
3. Pembinaan Kegiatan Siswa
4. Dukungan Kegiatan Personil
5. Kegiatan R.T Sekolah/Komite Sekolah

Langkah-langkah penyusunan RAKS

Di dalam pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah (RAPBS) melibatkan beberapa unsur diantaranya:

1. Pihak sekolah
2. Orang tua murid dalam wadah Komite Sekolah
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kasi Dikmad Kabupaten
4. Pemerintah kabupaten/Kementerian Agama Kabupaten.

Semua komponen ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan operasional sekolah sesuai kedudukan dan kapasitas.

Langkah-langkah penyusunan RAKS menjadi RKT:

1. RAKS disusun oleh sekolah dan pengurus dewan/komite sekolah
2. Setelah selesai dirumuskan selanjutnya RAKS dikirim ke kantor Departemen Pendidikan Kabupaten atau Kementerian Agama Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan
3. Oleh pemerintah RAKS diteliti di Kandep Diknas atau Kementerian Agama Kabupaten oleh pengawas dan kasubbag keuangan serta kasubbag PRP, serta subbag yang relevan, kemudian di kirim kembali ke sekolah setelah mendapat revisi.
4. Sekolah mengadakan rapat dengan dewan atau komite sekolah
5. RAKS disetujui oleh sekolah setelah mendapat kesepakatan dalam rapat anggota dewan atau komite sekolah
6. RAKS berubah menjadi RKT setelah disahkan oleh Kepala Kandep Diknas Kabupaten atau Kementerian Agama Kabupaten
7. RKT yang sudah disahkan dikirim kembali ke sekolah dan RKT ini yang dijadikan acuan pembiayaan sekolah

Pembukuan

Pembukuan ini meliputi pencatatan berbagai transaksi yang terjadi yang merupakan implementasi dari penganggaran. Tata cara pembukuan harus dikuasai benar oleh seorang bendaharawan.

Pembukuan dan bantuan dilakukan oleh bendaharawan yang mengelola dana tersebut dan dibukukan dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan dana bantuan di sekolah diatur sebagai berikut :

1. Kepala sekolah adalah administrator dana bantuan di sekolah dan untuk itu kepala sekolah diwajibkan membuat suatu pembukuan yang ditutup pada setiap akhir bulan.
2. Pembukuan dibuat dalam bentuk buku kas.

Kepala sekolah selaku administrator dan bantuan diwajibkan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah. Sekolah sebagai suatu unit pelaksana teknis mempunyai berbagai program yang didukung oleh anggaran rutin dan ada pula program yang didukung oleh dana dari sumbangan orang tua.

Dalam Buku Kas Umum dicatat/dibukukan semua pengeluaran dan penerimaan. Seperti semua penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan terlebih

dahulu, baru kemudian uangnya diterima atau dibayarkan. Uang yang disimpan bendaharawan terbagi pada dua tempat, yaitu di bank dan uang tunai dalam batas-batas tertentu. Saldo pada Buku Kas Umum harus mencerminkan pada tiga hal, yaitu Sisa dalam Kas (Uang Tunai), Sisa di Bank dan Kertas Berharga. Dalam pembukuan buku Kas Umum kadang-kadang terdapat selisih kurang atau selisih lebih, padahal prinsipnya saldo Buku Kas Umum harus sama dengan Saldo Kas.

Selisih kurang (ketekoran uang dalam Kas) pada umumnya disebabkan karena:

1. Uang yang tercuri, hilang, kebongkaran, kebakaran, dan sebagainya
2. Lipatan uang yang kurang, yang mungkin tidak dihitung terlebih dahulu
3. Pembulatan ke atas atau ketiadaan uang kecil untuk pembayaran
4. Kuitansi pengeluaran yang lupa dibukukan

Apabila ada kesalahan tulis pembukuan, misalnya angka yang dicatat dalam buku lebih besar atau lebih kecil dari bukti kuitansinya dapat dilakukan perbaikan dengan beberapa cara, antara lain.

1. Mencoret angka yang salah dengan dua garis lurus linier dan diparap, kemudian ditulis angka yang benar di atasnya.
2. Apabila terjadi kesalahan pembukuan pengeluaran, maka dibukukan kembali (*contra post*) atau didebet kemudian baru dibukukan dalam pos pengeluaran angka yang benar.
3. Hanya membukukan selisihnya saja pada Buku Kas Umum, jika terjadi selisih kurang dalam pembukuan pengeluaran, maka Buku Kas Umum dikredit sebesar selisih tersebut dan sebaliknya.

Simpulan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan..

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
- Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>
- <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03/pengelolaan-keuangan-sekolah.ht>
- Artikel "Pengelolaan Keuangan Sekolah" posted by Pendidikan Kewarganegaraan
- Artikel "Manajemen Keuangan Sekolah" posted by Akhmad Sudrajat
- Abdul Choliq, *Modul Kuliah Pascasarjana 2011* tidak diterbitkan
- Nurkolis. *Manajemen Berbasis Sekolah. Teori. Model dan Aplikasi 2003*. Grasindo. Jakarta
- Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Materi Pembinaan Kepala Sekolah/Madrasah, 2007. Departemen Pendidikan Nasional
- Kadarman A.M dan Udaya Juyuf, 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama